



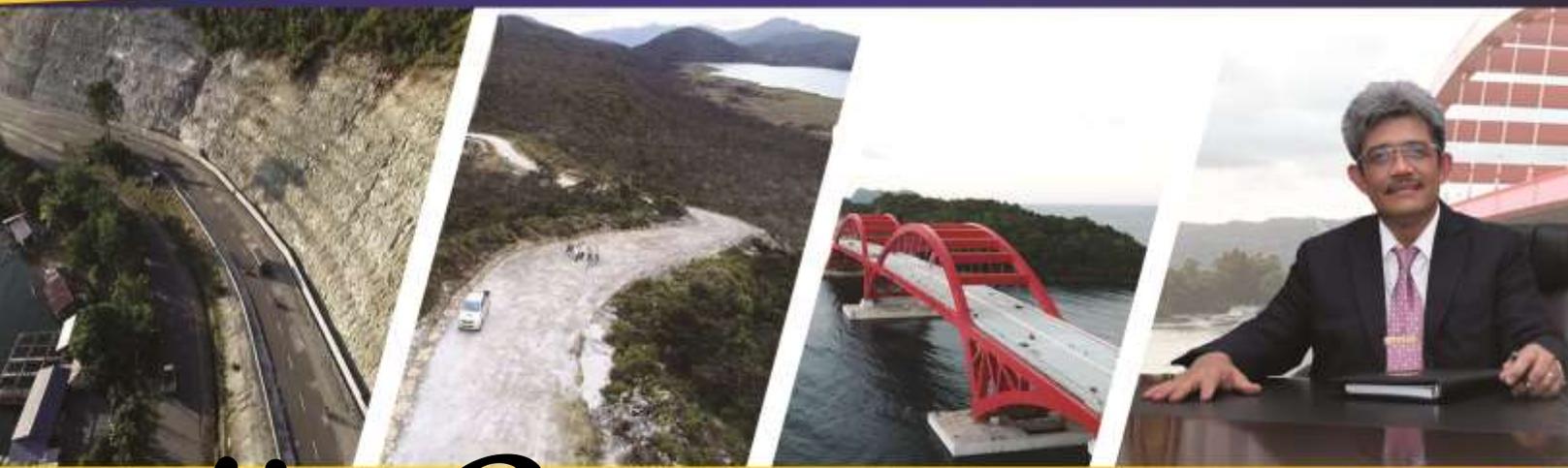
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

# 2019

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### SATUAN KERJA BBPJM XVIII JAYAPURA





# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan laporan tahun kelima dari pelaksanaan Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2015-2019 yang juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.

Melalui laporan ini, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2019. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2020

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN  
JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**



**Ir. Osman H. Mubun, M.MT**  
NIP. 40620921991031004

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya .....	11
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .....	11
2.1.2 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJK XVIII Jayapura .....	14
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) .....	17
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2019 .....	18
2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2019 .....	19
2.3 Metode Pengukuran .....	19
2.4 Target Tahun ini Menurut Dokumen Perencanaan Lainnya .....	21
<b>BAB III. KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	23
3.1 Sumber Daya Manusia .....	23
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	23
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	24
3.1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian .....	24
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	25
3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik dan Non Teknik .....	26
3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia .....	27

3.2 Sarana dan Prasarana .....	29
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	29
3.3.1 Perubahan Anggaran .....	29
<b>BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
4.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
4.2 Analisis Kinerja Organisasi.....	34
4.3 Perbandingan Kinerja Organisasi .....	39
4.4 Realisasi Anggaran.....	45
4.4.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	46
4.4.2 Analisis Penyerapan Anggaran .....	48
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Permasalahan .....	55
5.2 Langkah Kedepan.....	56

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sepanjang Tahun Anggaran 2019, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura telah menghadapi banyak hal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama 1 (satu) tahun anggaran tak jarang mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura. Selain itu, Satuan Kerja

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura juga dihadapkan oleh tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan yang ada. Berikut ini adalah tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura:

a) Tantangan Internal :

- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dengan status PNS yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil, sehingga menyebabkan adanya alokasi tambahan SDM untuk tenaga Non PNS;
- Kurang maksimalnya pemanfaatan tupoksi beberapa bidang yang menyebabkan penumpukan suatu pekerjaan pada bidang tertentu, sehingga hal ini menyebabkan timpangnya pemberian porsi pekerjaan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan;
- Kurang harmonisnya hubungan antar anggota. Hal ini biasanya dipicu oleh masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota sehingga menyebabkan timbulnya tingkah laku anggota yang kurang menguntungkan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura.

b) Tantangan Eksternal :

- Kurang stabilnya koneksi internet di Papua. Salah satu penyebab kurang optimalnya koneksi internet di Papua adalah frekuensi terjadi gempa yang cukup sering dan menyebabkan putusnya kabel optik bawah laut. Putusnya kabel optik ini pernah terjadi dan mengakibatkan lumpuhnya koneksi internet di Papua selama lebih dari satu bulan, hal ini cukup menghambat pelaksanaan pekerjaan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura;
- Adanya revisi RKAKL pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura menjelang akhir Tahun Anggaran. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses lelang dan pelaksanaan di lapangan terlebih khusus untuk paket pekerjaan yang baru muncul ketika revisi RKAKL sudah terbit;

Untuk merangkum semua hal yang terjadi selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura Tahun 2019. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pemanfaatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Tahun 2019 masing-masing menurut tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari :

### 1. Kepala Satker

#### a. Tugas :

- 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net;
- 3) Menetapkan pejabat pengadaan;
- 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
- 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA;
- 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- 9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan;
- 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
- 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsung;
- 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;

- 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
  - 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
  - 2) Bertanggung jawab atas semua penerimaan/ pengeluaran Satker yang membebani APBN;
  - 3) Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/ SPK/ Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
  - 4) Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
  - 5) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/ Kekayaan Negara Satker;
  - 6) Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/ Penanggung jawab Program.

## 2. Pejabat Pembuat Komitmen

- a. Tugas :
- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Kontrak;
  - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja;
  - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
  - 6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan;

- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan;
  - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;
  - 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan;
  - 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
  - 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/ Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa;
  - 15) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker;
  - 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
  - 17) Menandatangani pakta integritas;
  - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
  - 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas);
  - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
  - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita acara Pemeriksaan Barang;
  - 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
  - 23) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
  - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
  - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker;
  - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/ SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;

- 2) Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
  - 3) Bertanggung jawab kepada Kasatker.
3. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- a. Tugas :
    - 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja;
    - 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
    - 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
    - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
      - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank);
      - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
      - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
    - 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
    - 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-sekurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
      - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
      - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
      - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akutansi/ Verifikasi Keuangan;
      - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pembuat Komitmen;
      - e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
    - 8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN setempat;

- 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
  - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
4. Bendahara Pengeluaran
- a. Tugas :
- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran;
  - 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, dan SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
  - 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
  - 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara;
  - 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
  - 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
  - 7) Melakukan pembayaran melalui Uang persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas;
  - 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
  - 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait;

- 10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
  - 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada :
    - KPPN setempat;
    - BPK RI;
    - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - b. Tanggung jawab :
    - 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan;
    - 2) Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
    - 3) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
5. Penanggung jawab Unit Akuntansi Satuan Kerja
1. *Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)*
    - a. Tugas :
      - 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
      - 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait;
      - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
    - b. Tanggung jawab :
      - 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
      - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.
  2. *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*
    - a. Tugas :
      - 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
      - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
      - 3) Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.
    - b. Tanggung jawab :
      - 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
      - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang /Kepala Satuan Kerja

3. Petugas E-monitoring

a. Tugas :

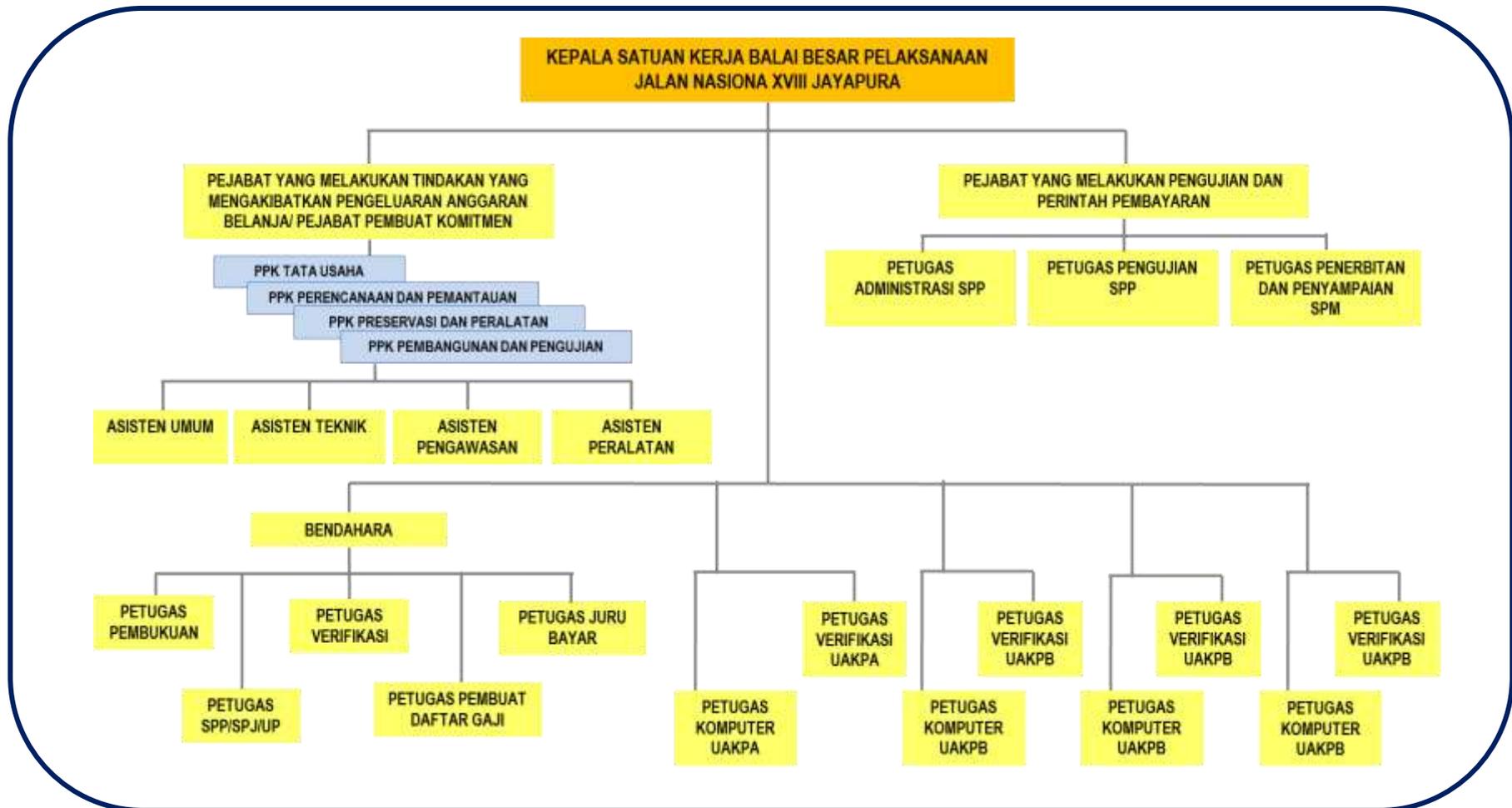
- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
  - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
  - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan).
  - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
  - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-monitoring online.
- 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodic sesuai ketentuan.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai ketentuan.

b. Tanggung jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (backup data maupun cetakan);
- 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target *outcome* dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk tahun 2019 merujuk kepada Rencana Kinerja Tahunan Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang merupakan turunan dari Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 2015 - 2019, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun sesuai dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

### 2.1 URAIAN SINGKAT DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

#### 2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

- **Visi**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 - 2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Ditjen Bina Marga sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya berlandaskan dan mengacu pada Visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG  
HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

- **Misi**

Dalam Rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional dalam program penyelenggaraan jalan, maka misi Direktorat Jenderal Bina Marga yang ditetapkan untuk periode tahun 2015-2019 dilaksanakan sejalan dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 yaitu :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua" ;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

- **Tujuan dan Sasaran Strategis**

**A. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju di akhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019 secara umum adalah:

***"Menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera".***

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lagi di dalam tujuan 1 sampai dengan tujuan 5. Adapun tujuan yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Bina Marga adalah tujuan 3, yaitu :

***“Menyelenggaraan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim”.***

#### **B. Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, maka terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bina Marga.

Adapun **SASARAN STRATEGIS** terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

#### **MENINGKATNYA DUKUNGAN KONEKTIVITAS BAGI PENGUATAN DAYA SAING**

Dengan indikator kinerja:

>> Tingkat konektivitas nasional sebesar **94,1 %** pada akhir 2019.

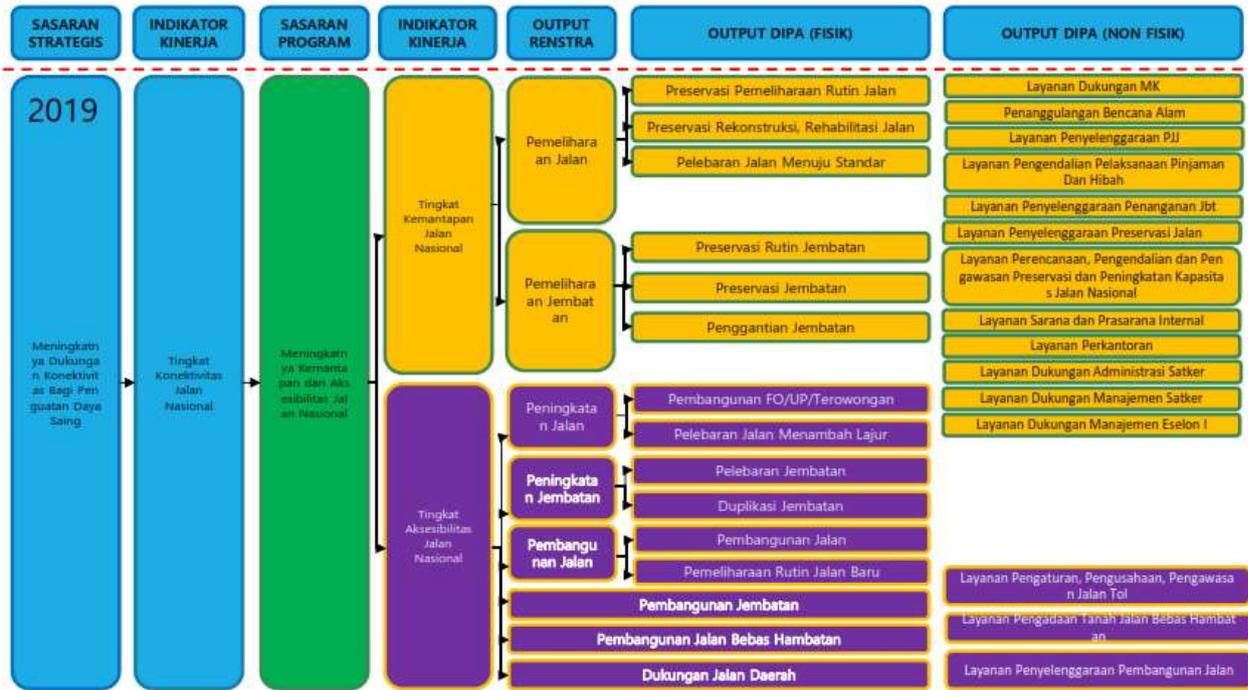
Dan **SASARAN PROGRAM** sebagai berikut :

#### **MENINGKATNYA KEMANTAPAN DAN AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL**

>> Dengan indikator kinerja program :

1. Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sebesar **98 %** pada akhir 2019;
2. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional sebesar **88,3 %** pada akhir 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan kemantapan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemantapan dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.



Gambar 2.1 Cascading Output Renstra TA 2019 Ditjen Bina Marga

2.1.2. Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJV XVIII Jayapura

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 6 bahwa seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian PUPR mulai dari Menteri, Unit Organisasi, Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis, hingga Satuan Kerja wajib menyusun Renstra. Peraturan tersebut juga menjadi landasan hukum penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya Satker BBPJV XVIII Jayapura.

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJV XVIII Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BBPJV XVIII Jayapura RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019, merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan. Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJV XVIII Jayapura ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Renstra BBPJV XVIII Jayapura;
2. Merupakan acuan pelaksanaan kegiatan tahunan bagi seluruh pegawai pada Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura;
3. Acuan dalam pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja seluruh kegiatan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura.

Dalam mendukung Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015-2019, maka target kinerja Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura pada tahun 2015-2019 diselaraskan dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra BBPJJN XVIII Jayapura dan Renstra Ditjen Bina Marga, dan juga mengakomodir isu-isu strategis yang menjadi tuntutan/ program utama daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satker BBPJJN XVIII Jayapura sebagai Satuan Kerja yang berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga.

Dibawah ini merupakan target kinerja Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura tahun 2015-2019, sebagai berikut :

Tabel II.1 Target Kinerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	4	4	12	1		21
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	12	12	12	2		38
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12	12	12	60
4	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan					12	12
5	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan					1	1

Sumber : Dokumen Perencanaan Lainnya Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura tahun 2015-2019

Untuk mendukung pencapaian target kinerja diatas maka alokasi anggaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Alokasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (DALAM RIBU)
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	51,147,099	37,823,802	28,749,036	22,274,354		139,994,291
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	8,946,878	1,226,529	7,632,520	10,339,304		28,145,231
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	35,970,876	27,390,932	24,261,688	30,101,663	28,425,626	146,150,785
4	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan					9,847,423	9,847,423
5	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan					19,345,978	19,345,978

Sumber : Dokumen Perencanaan Lainnya Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura tahun 2015-2019

Program penganggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 meliputi **Program Penyelenggaraan Jalan** yang terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Sasaran dari Kegiatan ini yang juga merupakan Output dari Kinerja Satker BBPJN XVIII Jayapura adalah :

1. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
2. Jumlah Layanan Perkantoran;
3. Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker;
4. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Keempat output di atas masuk dalam Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional untuk mendukung Sasaran Program Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional.

Terkait dengan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah diwajibkan agar pemerintah menyusun perjanjian kinerja sebagai ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (**outcome**).

Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Di dalam perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang menjadi panduan arah kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Supaya rencana/ target capaian kinerja yang ditetapkan di penetapan kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator output maupun outcome. Indikator tersebut mengacu pada program dan sasaran/ kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk dicapai dalam tahun 2019.

Komponen perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2019 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- **Program**, dalam penyusunan penetapan kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra yang kemudian menjadi acuan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta ditetapkannya rencana capaian kinerja.
- **Sasaran**, sesuai dengan yang dimuat dalam Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, pada Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019 terdapat 1 (Satu) sasaran dan 4 (Empat) Kegiatan. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tupoksi) dari Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015-2019.

- **Kegiatan**, sebagaimana dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perencanaan kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikatornya yang akan dicapai pada tahun 2019. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019.

Dengan adanya komponen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2019 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Sasaran Program, sesuai dengan yang dimuat dalam Reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015-2019). Pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019 terdapat 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatkan Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional;
- Indikator Kinerja, sesuai dengan yang dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tahun 2019 Awal, terdapat 1 indikator kinerja program yang memuat 3 indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun indikator kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019, sebagai berikut:

### ***Indikator Kinerja Program : Tingkat Kemantapan Jalan Nasional***

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah Layanan Perkantoran;
  2. Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker;
  3. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker.
- Target merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja yang dimiliki Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura di tahun 2019. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen DIPA awal unit kerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019;

- Jumlah Anggaran merupakan total alokasi anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang bersumber dari dokumen DIPA awal unit kerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 Awal disajikan dalam format pada tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini :

**AWAL**

**Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019**  
**Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan

**Jumlah Anggaran Kegiatan PK Revisi Tahun 2019 : Rp. 51,597,749,000.-**

*\*) Target indikator kinerja 2019 kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2019*

### 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2019

Di tahun 2019, target kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura mengalami perubahan/ revisi seperti tampak pada **Tabel II.2** di bawah ini:

**REVISI**

**Tabel II.2 Perbandingan Target Perjanjian Kinerja dengan Revisi Perjanjian Kinerja**  
**Indikator Kinerja Ouput Satuan Kerja BBPJM XVIII Jayapura**  
**Tahun Anggaran 2019**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>		
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan

<b>Jumlah Anggaran PK Awal Tahun 2019</b>	<b>: Rp. 51,597,749,000.-</b>
<b>Jumlah Anggaran PK Revisi Tahun 2019</b>	<b>: Rp. 61.637.587.000.-</b>

Dari data di atas, terlihat adanya perubahan target indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Revisi T.A. 2019 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Awal T.A. 2019. Terdapat penambahan 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional sebanyak 1 Layanan. Begitu juga dengan Alokasi DIPA setelah dilakukannya Revisi Perjanjian Kinerja T.A. 2019 mengalami penambahan sebanyak Rp. 10.039.838.000,-.

### 2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2019

Latar belakang adanya PK Revisi 2019 adalah terjadinya 4 (empat) kali perubahan/ revisi nilai Pagu DIPA milik Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Alasan adanya perubahan nilai Pagu DIPA milik Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura T.A. 2019 adalah sebagai berikut:

1. REVISI 1 : Ralat kode akun dan pergeseran anggaran antar sub komponen dalam satu komponen dan satu keluaran (output) yang sama
2. REVISI 2 : Pergeseran anggaran dari Satker BBPJM XVIII Jayapura kepada Satker BPJM XXII Merauke;
3. REVISI 3 : Pergeseran anggaran antar output dan antar satker untuk pemanfaatan sisa lelang;
4. REVISI 4 : Penambahan alokasi pemanfaatan dana PNBPN dan Belanja Pegawai.

## 2.3 METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan dalam menentukan capaian kinerja dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dinyatakan pada tabel berikut :

**Tabel. II.4 Tabel Sasaran Kegiatan dan Cara Pengukuran Tahun 2019 Satker BBPJM XVIII Jayapura**

No	Indikator Kegiatan Output	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah laporan yang tersusun	Emonitoring; SIPP
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah bulan yang terlayani	Emonitoring; SIPP
3	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Jumlah bulan yang terlayani	Emonitoring; SIPP
4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah laporan yang tersusun	Emonitoring; SIPP

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:

- Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2019 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja outcome (hasil) terhadap targetnya dari masing-masing indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang dapat dilihat pada **Tabel II.5** berikut :

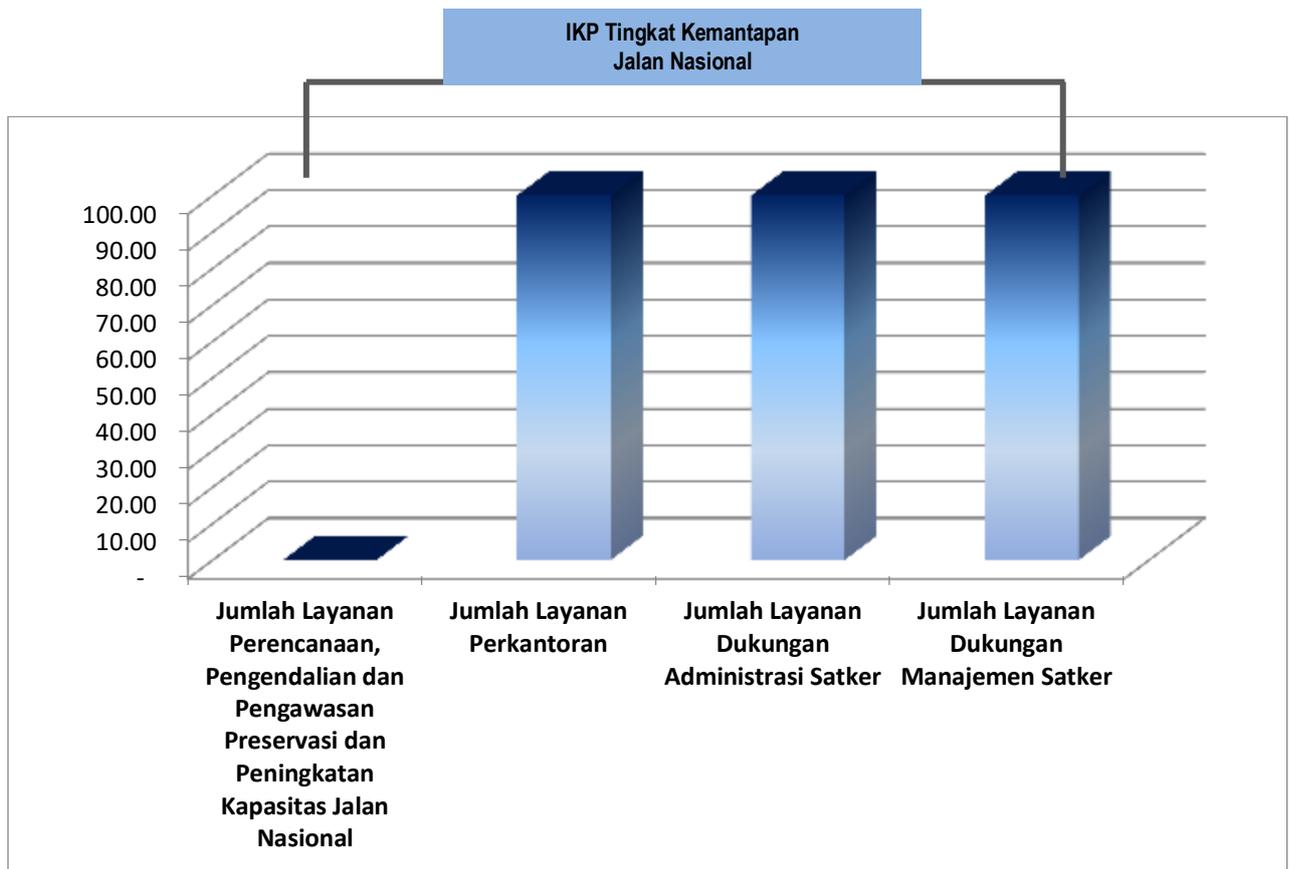
**Tabel II. 5 Pengukuran Kinerja Satker BBPJK XVIII Jayapura Tahun 2019**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>					
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional					
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>					
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Layanan	1 Layanan	- Layanan	-	-
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100.00	100.00
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.00	100.00
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.99	99.99

Anggaran Awal : Rp. 51,597,749,000.-

Anggaran Revisi : Rp. 61,637,587,000.-

Realisasi : Rp. 58,317,854,000.-



Gambar 2. 1 Realisasi Output Satuan Kerja BBPJN XVIII Jayapura T.A. 2019

## 2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2015 - 2019, merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan pada Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Dokumen Perencanaan Lainnya ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaannya yang telah memasuki tahun kelima/ terakhir, dipandang perlu melakukan penyesuaian target yang tercantum dalam Renstra BBPJN XVIII Jayapura ini dikarenakan terdapat beberapa kebijakan baik dari pusat yang mengharuskan adanya reviu terhadap target yang sudah ditetapkan di awal. Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan Target Perjanjian Kinerja Satker BBPJN

XVIII Jayapura pada PK Tahun Anggaran 2019 dengan Target Tahun 2019 pada Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJN XVIII Jayapura 2015-2019, sebagai berikut :

**Tabel II.6 Sandingan Target Perjanjian Kinerja dengan Rencana dan Strategi Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2019**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KETERANGAN
			DOK. PRC LAINNYA	AWAL	REVISI AKHIR	
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan			1	Terdapat penyesuaian target tahunan dari target yang tercantum Dokumen Perencanaan Lainnya menyesuaikan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan.
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12	Target output ini untuk tahun 2019 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan yang terdapat dalam PK 2019 Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai.
3	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	12	12	12	Target output ini untuk tahun 2019 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan yang terdapat dalam PK 2019 Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai.
5	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	Target output ini untuk tahun 2019 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan yang terdapat dalam PK 2019 Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai.

Sumber : Renstra 2015-2019 BBPJN XVIII Jayapura dan PK 2019 BBPJN XVIII Jayapura

# BAB III

## KAPASITAS ORGANISASI



## BAB III. KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

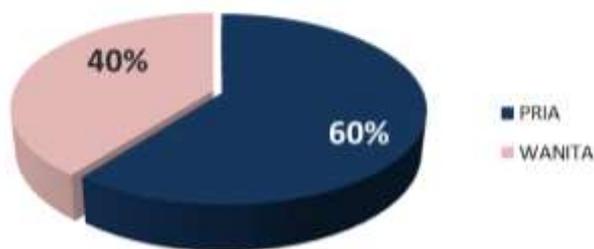
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 98 orang pegawai. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

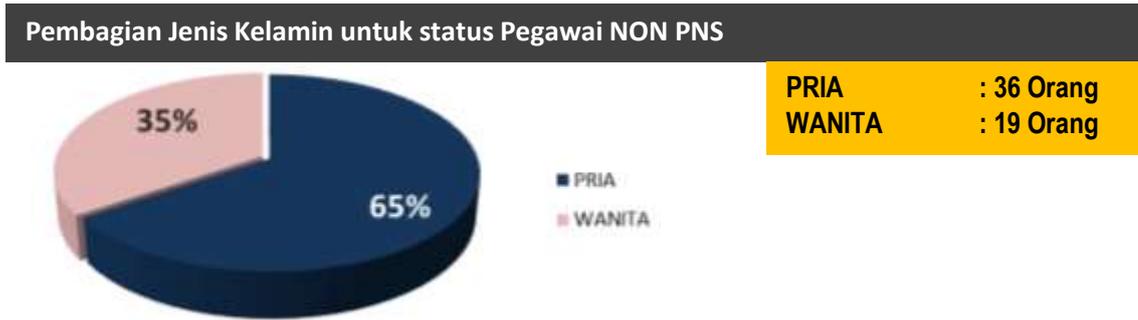
#### 3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai BBPJN XVIII Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan untuk status pegawai PNS maupun Non PNS. Hal ini juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh jenis bidang pekerjaan yang umumnya lebih membutuhkan tenaga kerja laki-laki untuk keperluan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan monitoring ke lapangan dengan tingkat mobilisasi yang tinggi. Total jumlah pegawai di Satker BBPJN XVIII Jayapura **berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan sebanyak 36 orang**, dapat dilihat pada **Gambar 1.2** sebagai berikut:

Pembagian Jenis Kelamin untuk status Pegawai PNS



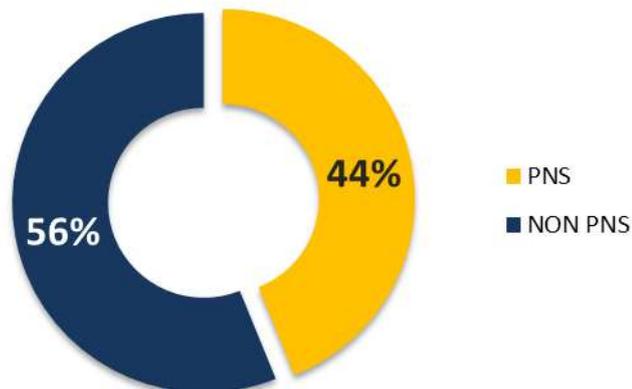
PRIA	: 26 Orang
WANITA	: 17 Orang



**Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

### 3.1.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai dengan jumlah 98 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.2** sebagai berikut:

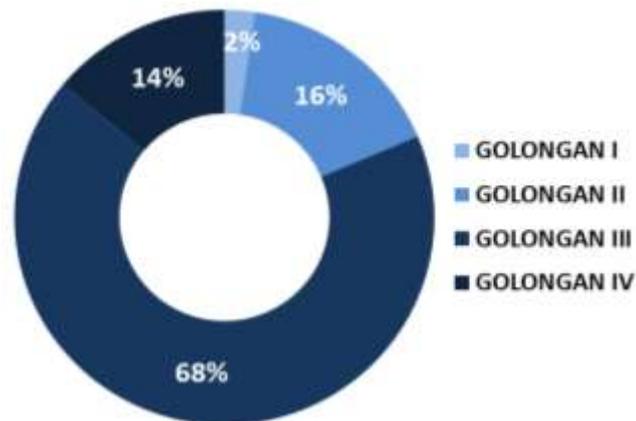


**Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS masih mendominasi jumlah pegawai yang ada di Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yaitu sebanyak **55 orang berstatus pegawai Non PNS**, sedangkan untuk status pegawai PNS sendiri sebanyak **43 orang** terdiri dari **PNS Pusat 40 orang** dan **PNS Dinas sebanyak 3 orang**.

### 3.1.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

Pengelompokan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada **Gambar 3.3** berikut :



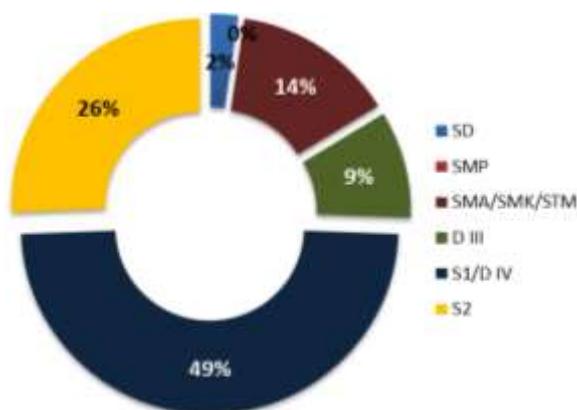
**Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan**

Berdasarkan **Gambar 3.3** di atas Golongan III merupakan yang terbanyak dengan persentase 68% sebanyak 29 orang, disusul Golongan II sebanyak 7 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang, dan paling sedikit adalah Golongan I dengan persentase 2% sebanyak 1 orang.

### 3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

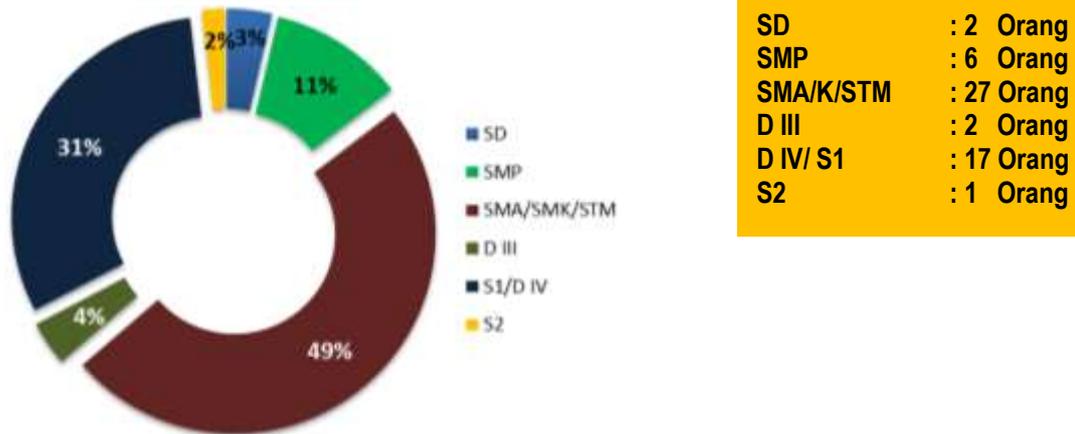
Jumlah pegawai menurut Pendidikan dapat dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/ Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS, sebagai berikut :

#### Klasifikasi Tingkat Pendidikan untuk Pegawai PNS



SD	: 1 Orang
SMP	: -
SMA/K/STM	: 6 Orang
D III	: 4 Orang
D IV/ S1	: 21 Orang
S2	: 11 Orang

## Klasifikasi Tingkat Pendidikan untuk Pegawai Non PNS



Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas Tingkat Pendidikan Strata 1/ Diploma IV merupakan jumlah terbanyak dengan persentase dengan total pegawai PNS maupun Non PNS sebanyak 38 orang sedangkan tingkat pendidikan SD merupakan yang terkecil dengan dengan total sebanyak 3 orang.

## 3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik dan Non Teknik

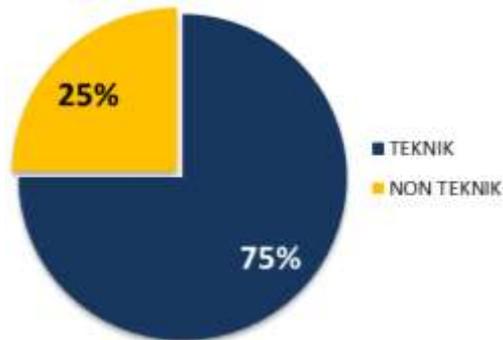
Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya diperhitungkan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang yang dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat pada

**Gambar 3.5** berikut :

## Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan Teknik &amp; Non Teknik untuk Pegawai PNS



## Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan Teknik &amp; Non Teknik untuk Pegawai Non PNS



Teknik	: 15 Orang
Non Teknik	: 5 Orang

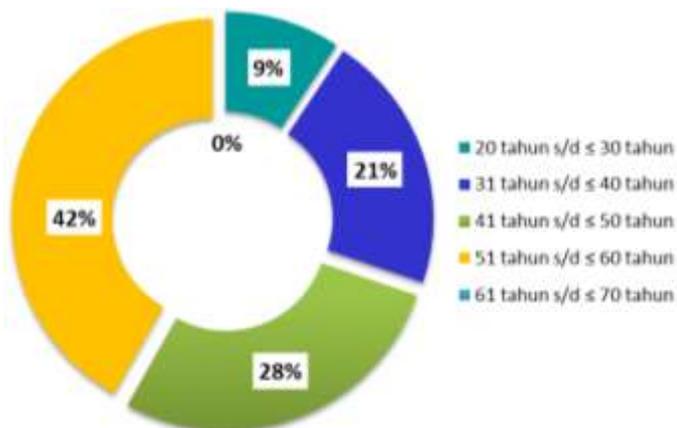
**Gambar 3.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik**

Dari data di atas diperoleh informasi bahwa dari total 56 pegawai PNS maupun Non PNS yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2, mayoritas memiliki keahlian di bidang teknik dengan total pegawai sebanyak 38 orang atau 68% dari keseluruhan, dan sisanya di bidang non teknik sebanyak 18 orang atau 32% dari keseluruhan. Hal ini tentunya sudah cukup sesuai untuk mendukung pekerjaan yang mayoritas ada di bidang keteknikan.

### 3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

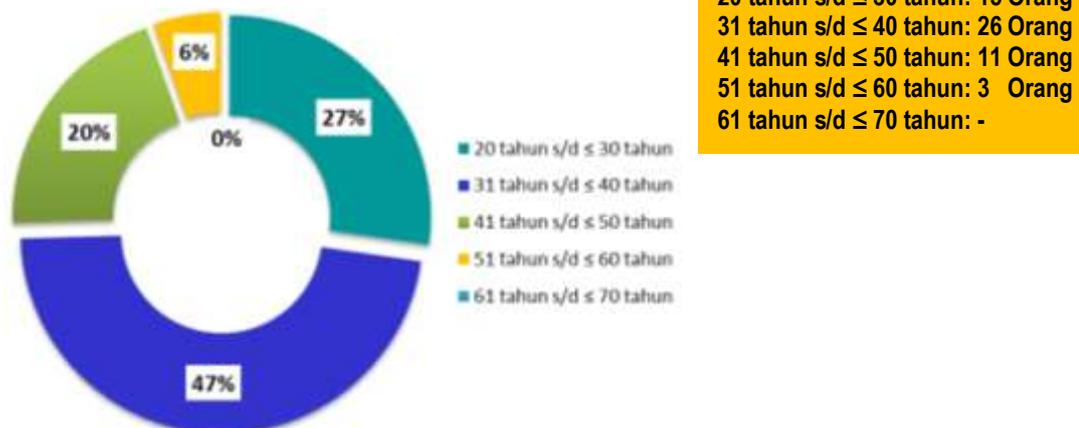
Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada **Gambar 3.6** dibawah ini:

## Klasifikasi Berdasarkan Usia untuk Pegawai PNS



20 tahun s/d ≤ 30 tahun:	4 Orang
31 tahun s/d ≤ 40 tahun:	9 Orang
41 tahun s/d ≤ 50 tahun:	12 Orang
51 tahun s/d ≤ 60 tahun:	18 Orang
61 tahun s/d ≤ 70 tahun :	-

## Klasifikasi Berdasarkan Usia untuk Pegawai Non PNS



Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi bahwa secara total, pegawai dengan kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun mendominasi jumlah keseluruhan pegawai Satker BBPJN XVIII Jayapura baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Namun apabila dirinci berdasarkan status pegawai, maka untuk Pegawai PNS, yang mendominasi justru kelompok usia 51 tahun s/d ≤ 60 tahun sebanyak 18 orang dari total sebanyak 43 pegawai PNS Satker BBPJN XVIII Jayapura. Hal ini menjadi catatan penting untuk bidang kepegawaian dalam hal memperhatikan para pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan sehingga kebutuhan Satker BBPJN XVIII Jayapura terhadap jumlah pegawai PNS kedepannya tetap terpenuhi untuk menunjang kinerja pada Satker BBPJN XVIII Jayapura sesuai bidang kerja dan tupoksi masing-masing.

Kemudian untuk pegawai dalam usia produktif perlu diperhatikan upaya-upaya pengembangan SDM melalui keikutsertaan pegawai dalam program pelatihan atau seminar untuk menunjang *skill*, pengetahuan, dan tentunya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.

### 3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.

Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7 golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester II Tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel III.1 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana berdasarkan Golongannya pada Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura**

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (SMT II TA 2019)	
			KUANTITAS	NILAI
1	TANAH	131111	39,999 M2	202,858,240,000
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	1,827	30,297,962,880
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	53	28,924,524,210
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	1	341,958,000
5	IRIGASI	134112	2	438,745,000
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	41,820,224,831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	166112	265	25,577,816,270
		<b>TOTAL :</b>	<b>42,153</b>	<b>330,259,471,191</b>

Sumber : Laporan Gabungan BMN Semester II T.A. 2019

### 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

#### 3.3.1 Perubahan Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2019 Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DIPA awal. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

**Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2019 : Rp. 51.597.749.000,-**  
**Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2019 : Rp 61.637.587.000,-**

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019 tercatat adanya pengurangan nilai DIPA keseluruhan untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura sebanyak **Rp. 10.039.838.000,-** Perubahan DIPA ini terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut :

**Tabel. III.2 Kronologis revisi DIPA pada Satker BBPJJN XVIII Jayapura T.A. 2019**

NO.	NOMOR DIPA	USULAN PENETAPAN	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	NILAI DIPA (*dalam ribu)		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
<b>SATKER BBPJJN XVIII JAYAPURA</b>								
1	SP DIPA- 033.04.1.448013/2019	AWAL	5 Desember 2018	1081-2060- 9220-7750	57,619,027	awal	-	DIPA AWAL
2	SP DIPA- 033.04.1.448013/2019	REVISI 1	7 Mei 2019	1081-2060- 9220-7750	57,619,027	57,619,027	Ralat kode akun dan pergeseran anggaran antar sub komponen dalam satu komponen dan satu keluaran (output) yang sama	DIPA TETAP
3	SP DIPA- 033.04.1.448013/2019	REVISI 2	17 Juni 2019	3845-8103- 1461-9886	57,619,027	51,597,749	Pergeseran anggaran dari Satker BBPJJN XVIII Jayapura kepada Satker BPJJN XXII Merauke	DIPA BERKURANG
4	SP DIPA- 033.04.1.448013/2019	REVISI 3	2 Oktober 2019	3304-6927- 0636-1627	51,597,749	54,230,731	Pergeseran anggaran antar output dan antar satker untuk pemanfaatan sisa lelang	DIPA BERTAMBAH
5	SP DIPA- 033.04.1.448013/2019	REVISI 4	25 November 2019	7900-3028- 9501-6032	54,230,731	61,637,587	Penambahan alokasi pemanfaatan dana PNPB dan Belanja Pegawai	DIPA BERTAMBAH

Di bulan Juni 2019 terdapat Revisi DIPA pergeseran anggaran dari BBPJJN XVIII Jayapura kepada BPJJN XXII Merauke yang disahkan pada 17 Juni 2019 sehingga DIPA BBPJJN XVIII Jayapura berubah dari semula Rp. 57.619.027.000,- menjadi Rp. 51.597.749.000,-. Sejak disahkannya Revisi DIPA BBPJJN XVIII Jayapura pada 17

Juni 2019, maka BBPJM XVIII Jayapura dan BPJM XXII Merauke sudah memiliki kantong anggaran masing-masing yang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Balai Besar dan Balai kecil dengan cakupan wilayah penanganannya masing-masing. Lembar Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2019 Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang sudah ditandatangani oleh Kepala Balai dan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran dokumen LKIP ini.

# **BAB IV**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

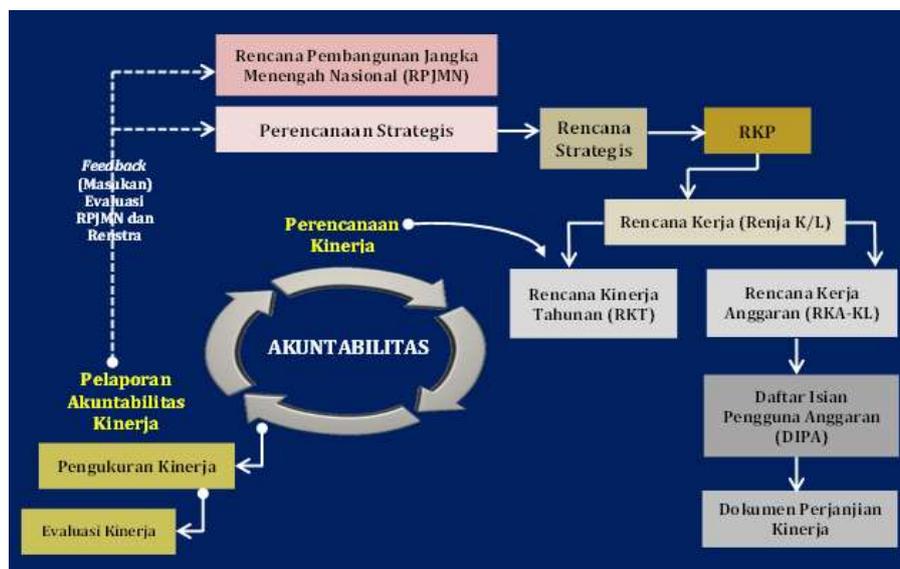


## BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan SAKIP;
- b. Rencana Strategis;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Pengelolaan Data Kinerja;
- f. Pelaporan Kinerja; dan
- g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:



**Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja**

#### 4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Di bawah ini merupakan realisasi target dibandingkan terhadap target rencana untuk Status terakhir di bulan Januari 2019 untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja bulan tersebut.

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/ kegagalan indikator kinerja selama periode yang dilaporkan.

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	>90% - 100%	<b>Sangat Memuaskan</b>	
2	>80% - 90%	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	>70% dan - 80%	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	
4	>60% - 70%	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	>50% - 60%	<b>Cukup</b> (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	
6	>30% - 50%	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	0% - 30%	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Pengukuran capaian kinerja target Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

**Tabel IV.2 Capaian Kinerja berdasarkan Target Revisi Pelaksanaan T.A. 2019**  
**Satker BBPJJN XVIII Jayapura**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	0	1	0		0.00	
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	12	100.00	100.00	
3	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	12	12	12	100.00	100.00	
4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	99.99	99.99	

Sumber : Emon BBPJJN XVIII Jayapura, pelaksanaan T.A. 2019 status bulan Januari 2020

Dari **Tabel IV.2** di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional capaiannya masih 0,00%, output ini baru muncul setelah ada revisi DIPA ke-empat dimana didalamnya terdapat kegiatan pemanfaatan dana PNBPN. Hanya dalam pelaksanaannya terdapat kendala dikarenakan SK usulan Pejabat Pemungut PNBPN dan Bendahara Penerima pemanfaatan dana PNBPN belum terbit karena masih tertahan di Biro Keuangan Jakarta hingga T.A 2019 berakhir sehingga kegiatan pemanfaatan dana PNBPN ini tidak terealisasi di T.A. 2019 ini. Di luar daripada itu capaian kinerja ketiga indikator kinerja kegiatan lainnya di Satker BBPJJN XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2019 sudah menunjukkan hasil dengan kategori Sangat Memuaskan, ditunjukkan oleh nilai prosentase realisasi kinerja semua output yang berada di atas 95 %. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan akumulasi realisasi target yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2019. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan tiap bulannya sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

## 4.2 ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Analisis tentang pencapaian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2019 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2015-2019;
- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

#### I. Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional merupakan Indikator Kinerja Program yang ditetapkan sesuai Reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Target dan Capaian Kinerja Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2019 adalah :

- Target Tingkat Kemantapan Jalan Nasional  
Kemantapan Jalan Nasional : 98,00 %
- Target Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Papua  
Kemantapan Jalan Nasional : 91,41 %
- Capaian Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Papua  
Kemantapan Jalan Nasional : **80,40 %**
- Capaian Kemantapan Jalan Nasional untuk Ruas Penanganan BBPJK XVIII Jayapura  
Kemantapan Jalan Nasional : **83,55 %**

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari :

##### a. **Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional**

<b>Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</b>					
<b>Volume (Layanan)</b>			<b>Keuangan (Rp. *dalam ribu)</b>		
<b>Awal</b>	<b>Revisi</b>	<b>Akhir</b>	<b>Awal</b>	<b>Revisi</b>	<b>Akhir</b>
-	1	-	-	231.000,00	-

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional sebesar **0,00%** yaitu dari 1 Layanan yang direncanakan, tidak dapat terealisasi di T.A. 2019. Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang dilakukan oleh Satker Balai berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Manfaat :**

- Penyediaan dan peningkatan layanan pada Satker BBPJN XVIII Jayapura yang berkualitas dan terukur, dan/ atau;
- Mendorong peningkatan PNBPN pada Satker BBPJN XVIII Jayapura.

**Permasalahan:**

- Realisasi pada output ini tidak mencapai 100% karena terdapat 1 layanan di Satker BBPJN XVIII Jayapura yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terealisasi disebabkan kendala SK usulan Pejabat Pemungut PNBPN dan Bendahara Penerima pemanfaatan dana PNBPN belum terbit karena masih tertahan di Biro Keuangan Jakarta hingga T.A 2019 berakhir.

**Tindak Lanjut :**

- Sudah dilakukan koordinasi secara aktif dengan pihak Biro Keuangan di Jakarta, namun SK usulan belum keluar hingga selesainya tahun anggaran.

**b. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran**

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
12	12	12	26.331.756,00	33.507.612,00	32.442.803,00

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran sebesar **100%** yaitu dari 12 Layanan yang direncanakan, semua terealisasi.

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2019 adalah :

- Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

**Permasalahan:**

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Layanan Perkantoran di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.

**c. Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker**

Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
12	12	12	9.098.556,00	9.467.326,00	9.339.303,00

Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker sebesar **100%** yaitu dari 12 Layanan yang direncanakan, semua terealisasi.

Cakupan Layanan Administrasi Satker Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Sistem Pelaporan Secara Elektronik;
- Administrasi Kegiatan;
- Penyusunan Laporan Keuangan BMN.

Layanan Layanan Dukungan Administrasi Satker ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu 12 bulan.

**Manfaat :**

- Sebagai pelaporan online mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang berguna bagi pengambil keputusan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pekerjaan;
- Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya;
- Penunjang penyelenggaraan administrasi kegiatan perkantoran;
- Transparansi data barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi kinerja di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura.

**Permasalahan :**

- Jumlah SDM yang terbatas sehingga menyebabkan beberapa orang harus memegang tanggung jawab lebih dari satu di luar Tupoksi yang sudah ditentukan.

**Upaya Tindak Lanjut :**

- Penambahan jumlah SDM dengan kompetensi yang sesuai;
- Efisiensi/Manajemen waktu yang baik sehingga pekerjaan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan berjalan secara efektif.

**d. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker**

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	16.167.437,00	18.431.649,00	16.535.748,00

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar **99,99 %** yaitu dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan.

Output Layanan Dukungan Manajemen Satker Tahun anggaran 2019 hanya ada di Satker BBPJN XVIII Jayapura. Cakupan Layanan Dukungan Manajemen Satker Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran;
- Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Papua;
- Konsultan Manajemen Proyek;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

**Permasalahan:**

Progress Fisik tidak mencapai 100% karena ada item Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) pada output Layanan Dukungan Manajemen Satker tidak terealisasi di T.A. 2019. Namun secara keseluruhan

tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Layanan Dukungan Manajemen Satker di BBPJN XVIII Jayapura.



**Gambar 4.2 Kegiatan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan yang berupa survei lapangan dan rapat pembahasan hasil survei di Kantor BBPJN XVIII Jayapura**

Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 4.21** berikut ini:



**Gambar 4.3 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja bersama Bapak Wakil Menteri PUPR yang dilaksanakan di BBPJN XVIII Jayapura**

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan pengujian/ manajemen mutu dan uji material dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 4.4 Kegiatan uji petik yang dilakukan pada pekerjaan peningkatan ruas jalan**

#### **4.3 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI**

Selama kurun waktu 2015 - 2019, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura telah berkontribusi dalam pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional melalui capaian indikator kinerja kegiatan layanan-layanan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Melihat kinerja Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui kinerja Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun ini dengan tahun sebelumnya, dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan menggunakan data capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2015, 2016, 2017, dan 2018). Disamping itu, disajikan juga data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (realisasi kumulatif terhitung mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019) dengan target jangka menengah (target kumulatif mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019) yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan lainnya Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura seperti tampak pada **Tabel IV.3** berikut :

Tabel IV.3 Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dan Capaian Kinerja Tahunan dan Kumulatif Tahun 2015-2019

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK PRC LAINNYA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015-2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI										
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	21	4	4			12	1	1	1		0	2	Tidak Tercapai. Terdapat penyesuaian target tahunan dari target Dokumen Perencanaan Lainnya menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	Tercapai
3	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	12									12	12	12	Tidak Tercapai. Terdapat penyesuaian target tahunan dari target Dokumen Perencanaan Lainnya menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan
4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1									1	1	1	Tercapai

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK PRC LAINNYA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015-2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI										
5	Jumlah Layanan Internal Overhead	Layanan	48	12		12		12	12	12	5			17	Tidak Tercapai. Terdapat penyesuaian target tahunan dari target Dokumen Perencanaan Lainnya menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan
6	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Dok	0			1								1	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJM XVIII Jayapura
7	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Pelaksanaan Pengujian dan Peralatan	Dok	0			1								1	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJM XVIII Jayapura
8	Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan dan Jembatan	Unit	0		2		2							4	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJM XVIII Jayapura

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK PRC LAINNYA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015-2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI										
9	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Jalan dan Jembatan	Dok	0		1									1	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
10	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	Dok	0		1		1							2	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
11	Jumlah Dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan	Dok	0		7									7	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
12	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengujian/Manajemen Mutu	Dok	0		3									3	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
13	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan	Dok	0		1									1	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK PRC LAINNYA 2015-2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015-2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI										
14	Jumlah Dokumen Penyiapan Perencanaan Program	Dok	0			7								7	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
15	Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)	Laporan	0			28								28	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
16	Jumlah Dokumen Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring)	Dok	0			28								28	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
17	Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	0			34								34	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura
18	Jumlah Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	0			1								1	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJJN XVIII Jayapura

NO	OUTPUT	SAT	TARGET DOK PRC LAINNYA 2015- 2019	2015		2016		2017		2018		2019		CAPAIAN 2015- 2019	KETERANGAN (Tercapai/Tidak Tercapai)
				TARGET	REALISASI										
19	Gedung/ Bangunan	M2	0		1,050									1,050	Output ini tidak terdapat di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJM XVIII Jayapura

Sumber : Data Reviu Dokumen Perencanaan Lainnya dan Pengukuran Kinerja Satker BBPJM XVIII Jayapura Tahun 2015-2019

#### 4.4 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran secara total berdasarkan laporan e-Monitoring status 7 Januari 2020 adalah sebesar **Rp2.224.016.564.103,-** atau 94,61% terhadap DIPA Revisi dan 113,02 % terhadap DIPA Awal tahun 2019. Data pencapaian keuangan Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dapat dilihat pada **Tabel IV.4** berikut:

**Tabel IV.4 Data DIPA Awal dan Realisasi Keuangan  
Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura  
Tahun Anggaran 2019**

<b>DIPA AWAL</b>	:	Rp. 51.597.749.000,-
<b>DIPA AKHIR</b>	:	Rp. 61.637.587.000,-
<b>REALISASI KEUANGAN</b>	:	Rp. 58.317.854.000,-
<b>SISA</b>	:	Rp. 3.319.733.000,-
<b>PERSEN REALISASI</b>	:	94,61%

Berdasarkan realisasi anggaran Satker BBPJN XVIII Jayapura Tahun 2019, dibawah ini disajikan informasi realisasi anggaran masing-masing output berdasarkan Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 5 Pagu dan Realisasi Anggaran**

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
<b>Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan Nasional</b>		<b>51,597,749.00</b>	<b>61,637,587.00</b>	<b>58,317,854.00</b>	<b>113.02</b>	<b>94.61</b>	
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	-	231,000.00	-		0.00	
2	Jumlah Layanan Perkantoran	26,331,756.00	33,507,612.00	32,442,803.00	123.21	96.82	
3	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	9,098,556.00	9,467,326.00	9,339,303.00	102.65	98.65	
4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	16,167,437.00	18,431,649.00	16,535,748.00	102.28	89.71	

Realisasi IKP Tingkat Kemantapan Jalan Nasional pada Satker BBPJN XVIII Jayapura menunjukkan presentase yang Sangat Memuaskan di angka 94,61%. Capaian penyerapan tersebut mengalami kenaikan 3,48% dari tahun sebelumnya dimana rata-rata IKP Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2018 sebesar 91,13%. Diluar kendala tidak terealisasinya pemanfaatan dana PNBPN,

capaian kinerja tahun ini yang termasuk kategori Memuaskan hingga Sangat Memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mendorong agar progress fisik dapat dipacu dan diikuti oleh progress keuangan adalah sebagai berikut :

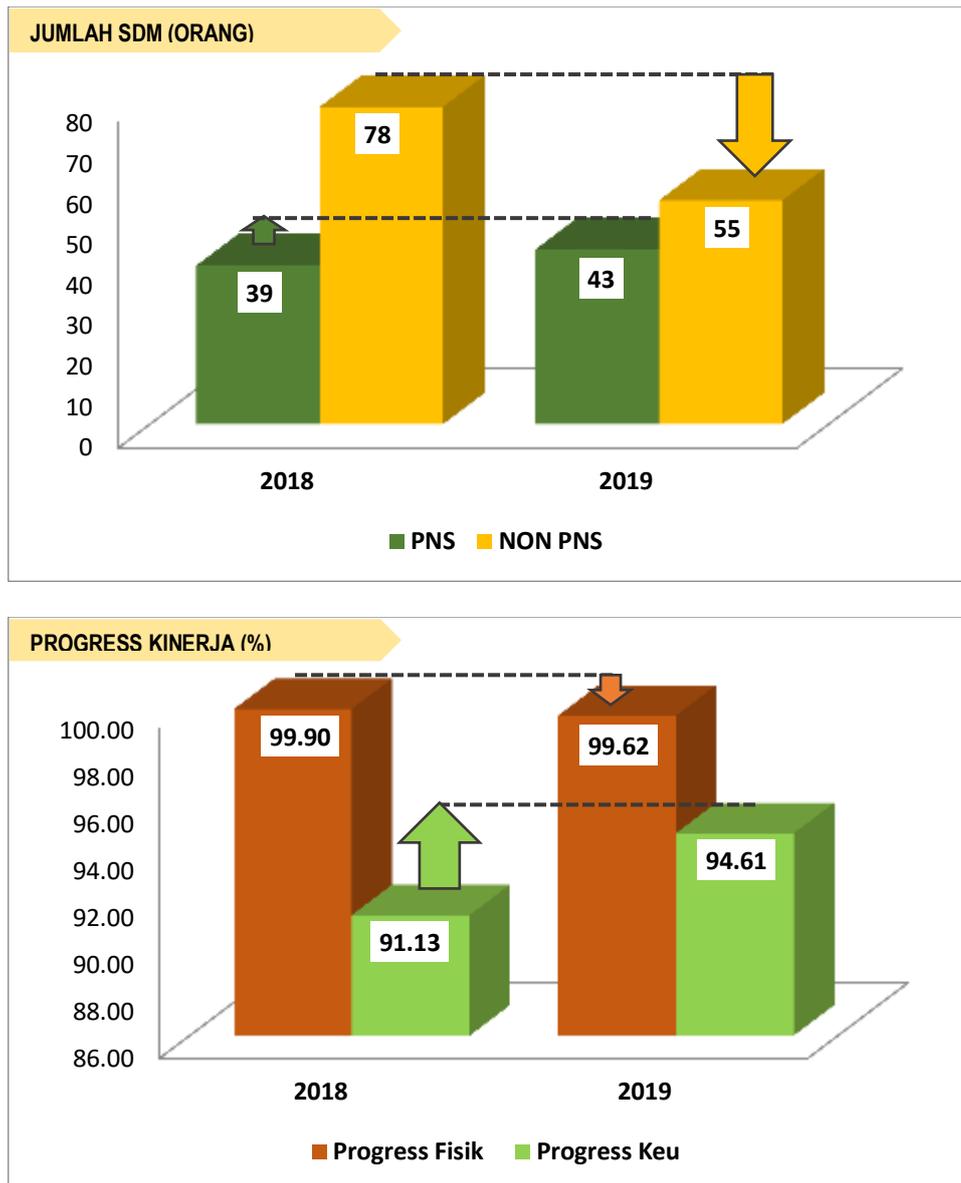
- Penerapan pola “Deteksi Dini” atas permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan sumber daya, manajemen dan proses administrasi;
- Pemetaan permasalahan yang dilakukan setiap bulan untuk ditetapkan siapa yang dipandang perlu dan mampu untuk mengambil tindakan turun tangan;
- Monitoring secara intensif atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam upaya penyelesaian suatu masalah.

#### **4.4.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Satker BBPJN XVIII Jayapura sebagai Unit Satuan Kerja dibawah koordinasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015-2019. Tercapainya sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan Trans Papua dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Satker BBPJN XVIII Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Satker BBPJN XVIII Jayapura melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Satker BBPJN XVIII Jayapura langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Secara berkala dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan.

Satker BBPJN XVIII Jayapura menggunakan indikator capaian kinerja dan anggaran tahun sebelumnya dengan tahun 2019 kemudian membandingkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura, dengan data dan informasi sebagai berikut :



**Gambar 4.5 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progress Fisik dan Keuangan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura Tahun 2018-2019**

Keterangan	2018	2019
<b>Jumlah SDM</b>	<b>117</b>	<b>98</b>
>> PNS	39	43
>> NON PNS	78	55
<b>Progress Fisik</b>	<b>99.90</b>	<b>99.62</b>
<b>Progress Keu</b>	<b>91.13</b>	<b>94.61</b>

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa secara umum terjadi pengurangan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Satker BBPJN XVIII Jayapura, namun untuk pegawai PNS mengalami peningkatan jumlah SDM sebanyak 4 orang dibandingkan T.A. 2018. Hal ini terjadi karena ada beberapa pegawai Non PNS yang diterima menjadi CPNS dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Satker BBPJN XVIII Jayapura. Secara umum terbentuknya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diantaranya berisi tentang perubahan nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja, tidak begitu mempengaruhi jumlah SDM yang bekerja di Satker BBPJM XVIII Jayapura karena jumlah sumber daya manusia di masing-masing Satker dalam wilayah balai yang baru terbagi sesuai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing balai, relatif tidak merubah jumlah SMD di Satker BBPJM XVIII Jayapura.

Untuk capaian kinerja fisik mengalami penurunan 0,28% dari tahun sebelumnya, sedangkan tingkat penyerapan keuangan mengalami peningkatan 3,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum hal ini sebenarnya tidak begitu dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kini dimiliki oleh Satker BBPJM XVIII Jayapura, sebab pengurangan ini terjadi sesuai wilayah kerja masing-masing dan jumlah sumber daya manusia di masing-masing Satker dalam wilayah balai masing-masing tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan capaian kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan karena terdapat 1 layanan di Satker BBPJM XVIII Jayapura yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terealisasi karena kendala SK usulan Pejabat Pemungut PNBPN dan Bendahara Penerima pemanfaatan dana PNBPN belum terbit karena masih tertahan di Biro Keuangan Jakarta hingga T.A 2019 berakhir. Namun apabila kita melihat capaian progress Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan, progress fisik dan keuangan yang berhasil dicapai masih di atas 90% dan masuk ke dalam kategori Sangat Memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa Satker BBPJM XVIII Jayapura tetap bisa memaksimalkan kinerjanya bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BBPJM XVIII Jayapura serta Renstra tahun 2015- 2019 BBPJM XVIII Jayapura dan ditetapkan setiap tahunnya melalui Perjanjian Kinerja.

Capaian progress kinerja dan keuangan yang berhasil dicapai tahun ini dengan jumlah sumber daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi Satker BBPJM XVIII Jayapura untuk terus melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan kerja selama ini ada yang harus diperbaiki, seperti contohnya perencanaan program yang tidak matang, proses birokrasi yang berbelit-belit, cara kerja yang tidak efisien atau lambat, cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, dan sebagainya. Dari sisi peningkatan kualitas/ kompetensi pegawai Satker BBPJM XVIII Jayapura, para pemangku kepentingan juga perlu memberikan perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/ pegawai yang dimiliki dalam keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai dalam menunjang prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing sehingga di tahun yang akan datang Satker BBPJM XVIII Jayapura dapat menyelesaikan setiap target kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

#### **4.4.2 Analisis Penyerapan Anggaran**

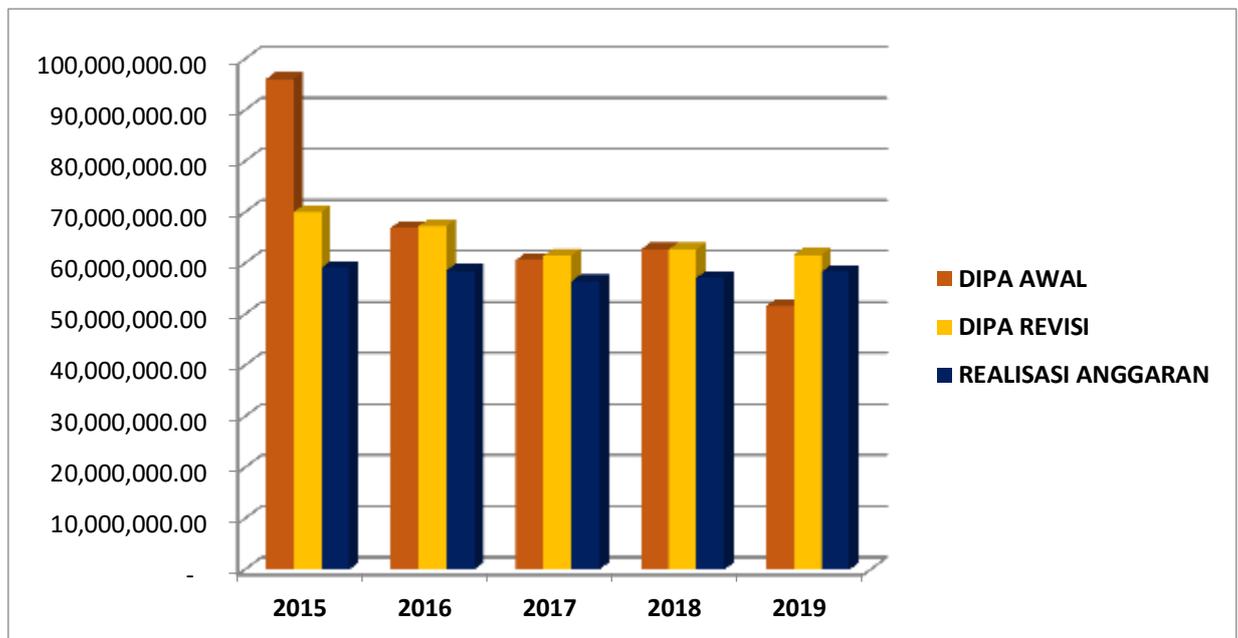
Total alokasi anggaran Satker BBPJM XVIII Jayapura tahun 2019 sesuai DIPA awal sebesar Rp. 51.597.749.000,- yang berasal dari APBN. Tidak ada sumber dana dari PHLN maupun LOAN. Pada periode

Tahun Anggaran 2019 realisasi anggaran mencapai Rp. 58.317.854.000,- atau sebesar 94,61% dari total anggaran DIPA revisi terakhir. Rekapitulasi alokasi dan realisasi anggaran Satker BBPJN XVIII Jayapura tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada **Tabel IV.6** dan **Gambar 4.6** berikut :

**Tabel IV.6 Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019**  
**Satker BBPJN XVIII Jayapura**

*\*dalam ribu*

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA AWAL (Rp.)	DIPA REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI ANGGARAN
1	2015	96,064,853.00	69,982,523.00	59,090,743.00	10,891,780.00	84.44
2	2016	66,944,487.00	67,255,466.00	58,558,633.00	8,696,833.00	87.07
3	2017	60,643,244.00	61,483,649.00	56,462,869.00	5,020,780.00	91.83
4	2018	62,715,321.00	62,715,321.00	57,150,388.00	5,564,933.00	91.13
5	2019	51,597,749.00	61,637,587.00	58,317,854.00	3,319,733.00	94.61



**Gambar 4.6 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019**

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja maka diperoleh data alokasi dan realisasi anggaran pada Satker BBPJN XVIII Jayapura Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Dari tabel dan grafik diperoleh informasi untuk jumlah alokasi anggaran dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini selain disesuaikan dengan kebutuhan prioritas penanganan di lapangan, juga dipengaruhi oleh pemekaran Balai yang terjadi di tahun 2016 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, dan pada tahun 2019 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke, sehingga ruas jalan nasional Provinsi Papua yang tahun 2015 seluruhnya masih ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, kini alokasi anggarannya menyesuaikan jumlah ruas yang ditangani masing-masing Balai. Berkat

kinerja dan kerjasama yang optimal maka pada tahun 2019 Satker BBPJN XVIII Jayapura berhasil mencapai realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,61 % dimana mengalami peningkatan 3,48% dari tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini akan menyajikan data target dan realisasi anggaran pada output-output fisik yang telah dikelola oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura selama kurun waktu 2015 – 2019. Sepanjang lima tahun tersebut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura menggunakan alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan SBSN untuk memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional, seperti tampak pada **Tabel IV.7** berikut:



NO	OUTPUT	2015			2016			2017			2018	
		TARGET (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	REAL KEU (%)	TARGET (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)
17	Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				700,000.00	681,437.00						
18	Jumlah Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				492,455.00	174,957.00						
19	Gedung/ Bangunan	7,964,171.00	7,879,774.00									

**TOTAL ALOKASI ANGGARAN SEPANJANG TAHUN 2015-2019 : Rp. 323.074.546.000,-**

**TOTAL ANGGARAN YANG TEREALISASI SEPANJANG TAHUN 2015-2019 : Rp. 289.580.487.000,-**

Dari angka di atas dapat diketahui bahwa terdapat alokasi anggaran yang tidak terserap dengan total sebesar Rp. 33.494.059.000,- selama kurun waktu 2015-2019, hal ini menja kinerjanya melalui strategi dan inovasi serta melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait, dan tentunya dengan melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap p maksimal dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai bisa terealisasi sesuai target rencana yang sudah diberikan.

Peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah meliputi bagaimana peningkatan kualitas/ mutu dari Sumber daya Manusia di lingkungan Satker BBPJK XVIII Jayapura. Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian di dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.8 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut**

<b>NO.</b>	<b>HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
<b>1</b>	<b>MANAJEMEN</b>	
	Kurangnya Komunikasi dengan personil Satuan Kerja	Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung (rapat) maupun tidak langsung (telepon)
	Penempatan posisi SDM Satker yang tepat	Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil
	SOP untuk pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian	Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian
<b>2</b>	<b>PERENCANAAN</b>	
	Komitmen terhadap pencapaian kinerja	Meningkatkan prestasi capaian target
	Pengoptimalan fungsi dari Renstra dan Penetapan kinerja sebagai penunjuk arah pencapaian visi dan misi organisasi	Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan peraturan dan visi misi yang akan dicapai
	Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas	Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai prioritas
	Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan	Melakukan gelar personil Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
	Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis	Melakukan pembahasan bersama mengenai spesifikasi teknis
	Kurangnya pemahaman terhadap dampak lingkungan	Memberikan pengarahan mengenai lingkungan hidup
<b>3</b>	<b>PENGADAAN</b>	
	Kurangnya personil yang memiliki sertifikasi Perpres No. 04 Tahun 2015	Aktif mengirim staf untuk mengikuti sertifikasi Perpres No. 04 tahun 2015
	Pemahaman yang berbeda terhadap Perpres No. 04 Tahun 2015 dan pembuatan dokumen pengadaan yang belum seragam	Melakukan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan pemahaman yang sama terhadap Perpres No. 04 Tahun 2015 dan dalam pembuatan dokumen pengadaan
	Banyaknya surat yang menyatakan tidak puas terhadap proses lelang	Memperbaiki proses pelelangan secara terus menerus dan aktif melakukan pembahasan yang melibatkan semua unsur (Pejabat Struktural, Satker, PPK, ULP dan Pokja)
	Pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dengan e-procurement	Memberikan pelatihan mengenai e-procurement mengoptimalkan penggunaan e-procurement sebagai alat untuk melakukan pengadaan yang lebih transparan
<b>4</b>	<b>PELAKSANAAN</b>	

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
	Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi	Membuat SOP mengenai SMM dan melakukan uji petik di lapangan
	Kurang intensifnya koordinasi dengan Pemda setempat	Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat secara terus-menerus
	Kemampuan Kontraktor dan Konsultan yang masih kurang	Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf Kontraktor dan Konsultan
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
	Peninjauan lapangan perlu ditingkatkan	Meningkatkan frekuensi peninjauan lapangan
	Peran Konsultan Supervisi belum optimal	Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan
	Kemampuan teknis staf satker dalam melakukan pengawasan di lapangan belum memadai	Mengikut sertakan staf pengawas pada Satker pada diklat-diklat pengawasan
<b>6</b>	<b>EVALUASI</b>	
	Sistem evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal	Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

# BAB V

## PENUTUP



## BAB V. PENUTUP

Secara umum, kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sudah menunjukkan performa yang **Sangat Memuaskan** dikarenakan sebagian besar kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura **berada di atas 90%**. Indikator Kinerja Kegiatan yang kinerjanya **>90% - 100%** dengan kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu:

1. Jumlah Layanan Perkantoran;
2. Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker;
3. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak terealisasi dan dibutuhkan strategi peningkatan kinerja di periode Tahun Anggaran yang akan datang adalah Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, sangat diharapkan kinerja yang sudah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan. Di samping itu pentingnya disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai.

### 5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas yang bertempat tinggal menyebar. Hal ini menyebabkan beberapa daerah masih belum terjangkau fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya di kawasan pegunungan. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka membuka keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. Dari informasi permasalahan yang ada pada Bab IV, maka permasalahan utama yang cenderung menjadi pendorong kinerja menjadi tidak maksimal lebih kepada Faktor SDM dimana jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.

## 5.2 LANGKAH KEDEPAN

- a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
- b. Disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai;
- c. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen sistem AKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan sistem AKIP dimasa mendatang.

# LAMPIRAN

- >> Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2019 (Awal)
- >> Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2019 (Revisi)
- >> Pengukuran Kinerja T.A. 2019
- >> Data Kaki LKIP T.A. 2019
- >> Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2019  
(Kondisi 0%, 50%, 100%)



JALAN GEDEBALE PANDUKING, JAWA BARAT



elevated road, maros

# PERJANJIAN **KINERJA** TAHUN 2019



jembatan holtekamp

**SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN  
JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Osman H. Marbun, M.MT  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Sugiyartanto, MT  
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan

Kegiatan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Anggaran

Rp. 57.619.027.000,00



Jayapura, Januari 2019  
Kepala Satuan Kerja Balai Besar  
Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura,



**REVISI**



**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN**  
**NASIONAL XVIII JAYAPURA**



Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat  
**Direktorat Jenderal Bina Marga**



REVISI

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. OSMAN H. MARBUN, M.MT  
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SUGIYARTANTO, MT  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan

Kegiatan :

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Anggaran

Rp 51.597.749.000,00

**Direktur Jenderal Bina Marga,**



**Ir. SUGIYARTANTO, MT**

Jayapura, 1 Juli 2019

**Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura**

BALAI BESAR PELAKSANAAN  
JALAN NASIONAL XVIII



**Ir. OSMAN H. MARBUN, M.MT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME REVISI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN REVISI	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kematapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional					51,597,749.00	
		Tingkat Kematapan Jalan Nasional				51,597,749.00	
		994 Layanan Perkantoran	12 Layanan			26,331,756.00	
			12 Layanan	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		26,331,756.00	
				001 Gaji dan Tunjangan		19,242,316.00	
			12 BLN		N - PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	19,242,316.00	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7,089,440.00	
			12 BLN		O - BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	1,971,640.00	
					P - HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF	5,117,800.00	
		015 Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan			9,098,556.00	
			12 Bulan Layanan	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		9,098,556.00	
				051 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring )		23,595.00	
					M - SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	23,595.00	
				060 Administrasi Kegiatan		8,936,781.00	
					I - BELANJA SEWA	781,080.00	
					J - BELANJA PERJALANAN DINAS	441,440.00	
					K - HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	7,400,761.00	
					L - BELANJA PERSEDIAAN KONSUMSI	292,500.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME REVISI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN REVISI	KETERANGAN
						(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					P - HONOR KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN	21,000.00	
				235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN		138,180.00	
					S - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	138,180.00	
		970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan			16,167,437.00	
			1 Layanan	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		16,167,437.00	
				051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		9,999,698.00	
				001 Pelayanan Publik (PNBP)			
					A - PENYIAPAN BAHAN USULAN PROGRAM TAHUNAN DAN 5 TAHUNAN	445,752.00	
			1 DOK		E - SURVEY KONDISI JALAN DAN INSPEKSI JEMBATAN	9,553,946.00	
				052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		6,167,739.00	
					B - SISTEM MANAJEMEN MUTU JALAN DAN JEMBATAN	319,455.00	
					C - UJI PETIK MUTU KONSTRUKSI	321,878.00	
			1 PKT		D - AKREDITASI LABORATORIUM	60,698.00	
			1 LS		F - PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	94,000.00	
					G - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN	2,366,258.00	
					H - KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK	3,005,450.00	



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	ANGGARAN REALISASI	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<b>Indikator Kinerja Program</b>											
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional											
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>											
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Layanan	1 Layanan	- Layanan	-	-	-	231,000.00	-			0.00
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100.00	100.00	26,331,756.00	33,507,612.00	32,442,803.00	123.21	96.82	
Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.00	100.00	9,098,556.00	9,467,326.00	9,339,303.00	102.65	98.65		
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.99	99.99	16,167,437.00	18,431,649.00	16,535,748.00	102.28	89.71		

Kegiatan :

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

**Anggaran Awal**

Rp 51,597,749,000

**Anggaran Revisi**

Rp 61,637,587,000

**Anggaran Realisasi**

Rp 58,317,854,000

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019  
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	VOLUME CAPAIAN	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI AKHIR / EMON	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(8)*100	(7) = (6)/(4)*100	(8) = (6)/(5)*100	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (14)/(12)*100	(16) = (14)/(13)*100	(17)
	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional									51,597,749.00	61,637,587.00	58,317,854.00	113.02	94.61	
		Tingkat Kemantapan Jalan Nasional								51,597,749.00	61,637,587.00	58,317,854.00	113.02	94.61	
		Layanan Perencanaan, Pengendalian 014 dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Layanan	1 Layanan	- Layanan		0.00			-	231,000.00	-		0.00	
			- Layanan	1 Layanan	- Layanan		0.00	PROVINSI PAPUA		-	231,000.00	-		0.00	
			Layanan	1 Layanan	- Layanan		0.00	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		-	231,000.00	-		0.00	
								221 Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	231,000.00	-		0.00	
			Layanan	1 Layanan	- Layanan		0.00	T PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			231,000.00	-		0.00	SK usulan Pejabat Pemungut PNB dan Bendahara Penerima pemanfaatan dana PNB belum terbit karena masih tertahan di Biro Keuangan Jakarta hingga T.A 2019 berakhir.
		994 Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100.00	100.00			26,331,756.00	33,507,612.00	32,442,803.00	123.21	96.82	
			12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100.00	100.00	PROVINSI PAPUA		26,331,756.00	33,507,612.00	32,442,803.00	123.21	96.82	
			12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	100.00	100.00	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		26,331,756.00	33,507,612.00	32,442,803.00	123.21	96.82	
								001 Gaji dan Tunjangan		19,242,316.00	24,967,816.00	24,787,415.00	128.82	99.28	
								N PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL		19,242,316.00	24,967,816.00	24,787,415.00	128.82	99.28	
								002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7,089,440.00	8,539,796.00	7,655,388.00	107.98	89.64	
								O BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN		1,971,640.00	1,971,640.00				
								P HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF		5,117,800.00	5,817,900.00	7,655,388.00			
								Z KEGIATAN JASA KEAMANAN			750,256.00				Pemanfaatan Dana Sisa Lelang
		015 Layanan Dukungan Administrasi Satker	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.00	100.00			9,098,556.00	9,467,326.00	9,339,303.00	102.65	98.65	
			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.00	100.00	PROVINSI PAPUA		9,098,556.00	9,467,326.00	9,339,303.00	102.65	98.65	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME AWAL	VOLUME REVISI	VOLUME CAPAIAN	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI AKHIR / EMON	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI THD REVISI	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(8)*100	(7) = (6)/(4)*100	(8) = (6)/(5)*100	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (14)/(12)*100	(16) = (14)/(13)*100	(17)	
			12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.00	100.00	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		9,098,556.00	9,467,326.00	9,339,303.00	102.65	98.65		
								Sistem Pelaporan Secara Elektronik (-Monitoring)		23,595.00	23,595.00	11,550.00	48.95	48.95		
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		M SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	23,595.00	23,595.00	11,550.00	48.95	48.95		
								060 Administrasi Kegiatan		8,936,781.00	9,195,191.00	9,114,172.00	101.98	99.12		
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		I BELANJA SEWA	781,080.00	781,080.00					
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		J BELANJA PERJALANAN DINAS	441,440.00	413,850.00					
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		K HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	7,400,761.00	7,400,761.00	8,885,042.00				
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		L BELANJA PERSEDIaan KONSUMSI	292,500.00	292,500.00					
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		P HONOR KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN	21,000.00	21,000.00					
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		Q PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		60,000.00	33,110.00			55.18	Pemanfaatan Dana Sisa Lelang
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		R PERALATAN DAN FASILITAS PELAYANAN PERKANTORAN		120,000.00	105,380.00			87.82	Pemanfaatan Dana Sisa Lelang
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		X ALAT PELINDUNG DIRI DAN APAR		106,000.00	90,640.00			85.51	Pemanfaatan Dana Sisa Lelang
								235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN		138,180.00	248,540.00	213,581.00	154.57	85.93		
			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00	100.00		S PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	138,180.00	248,540.00	213,581.00	154.57	85.93		
		970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.99	99.99			16,167,437.00	18,431,649.00	16,535,748.00	102.28	89.71		
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.99	99.99	PROVINSI PAPUA		16,167,437.00	18,431,649.00	16,535,748.00	102.28	89.71		
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.99	99.99	SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA		16,167,437.00	18,431,649.00	16,535,748.00	102.28	89.71		
								Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		9,999,698.00	8,901,672.00	8,854,679.00	88.55	99.47		
								001 Pelayanan Publik (PNBP)								
									A PENYIAPAN BAHAN USULAN PROGRAM TAHUNAN DAN 5 TAHUNAN	445,752.00	556,112.00	509,119.00	114.22	91.55		
									E SURVEY KONDISI JALAN DAN INSPEKSI JEMBATAN	9,553,946.00	8,345,560.00	8,345,560.00	87.35	100.00		
								052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		6,167,739.00	9,529,977.00	7,681,069.00	124.54	80.60		
									B SISTEM MANAJEMEN MUTU JALAN DAN JEMBATAN	319,455.00	298,796.00	290,354.00	90.89	97.17		
									C UJI PETIK MUTU KONSTRUKSI	321,878.00	235,878.00	228,194.00	70.89	96.74		
									D AKREDITASI LABORATORIUM	60,688.00	70,589.00	52,312.00	86.18	74.11		
									F PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	94,000.00	94,000.00	92,600.00	98.51	98.51		
									G MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN	2,366,258.00	2,909,134.00	2,888,629.00	122.08	99.30		
									H KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK	3,005,450.00	2,841,580.00	2,822,660.00	93.92	99.33		
									W PENGANGKUTAN ALAT BERAT		80,000.00	77,250.00			96.56	Pemanfaatan Dana Sisa Lelang
									Y PERBAIKAN PAGAR KANTOR BBP.JN XVIII JAYAPURA		3,000,000.00	1,229,070.00			40.97	Pemanfaatan Dana Sisa Lelang

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p data-bbox="643 337 1746 419"><b>Deskripsi :</b> Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Validasi IRI Semester II bersama Konsultan, PPK dan Satker dan Kepala Balai.</p>
<b>PAKET</b>	
Survei Kondisi Jalan, Jembatan, dan Lereng Provinsi Papua	 
<b>MANFAAT</b>	
Menyediakan data kondisi jalan, jembatan dan lereng untuk program penanganan jalan.	 

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan melalui Rapat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 pada 23 – 24 Mei 2019 di Aula BBPJN XVIII Jayapura</p>
<b>PAKET</b>	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
<b>MANFAAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi</b> : Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 pada 8– 9 November 2019 di Aula BBPJN XVIII Jayapura</p>
<b>PAKET</b>	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
<b>MANFAAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 bersama Bapak Wakil Menteri PUPR pada 8– 9 November 2019 di Aula BBPJN XVIII Jayapura</p>
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Papua</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Papua</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Papua.</p>
<p><b>PAKET</b></p>	
Survei Kondisi Jalan, Jembatan, dan Lereng Provinsi Papua	 
<p><b>MANFAAT</b></p>	
Menyediakan data kondisi jalan, jembatan dan lereng untuk program penanganan jalan.	 

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi</b> : Kegiatan Uji Petik oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian di Ruas Sugapa-Beoga.</p>
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>	 <p>3°41'49", 136°42'55", 1474.0m, 06° 2019-07-30 12:30:39</p>
<p>Uji Petik Mutu Konstruksi</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p>	 <p>3°41'50", 136°43'50", 1587.0m, 227° 2019-07-30 13:41:14</p>  <p>3°43'51", 136°43'51", 1587.0m, 131° 2019-07-30 12:30:01</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memeriksa kesesuaian bahan jalan dan jembatan sehingga layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
<p>Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional</p>	<p><b>Deskripsi :</b> Kegiatan Kunjungan Tim Akreditasi Komite Akreditasi Nasional(KAN) dalam rangka akreditasi ISO 17025:2017</p>
<p><b>PAKET/ KEGIATAN</b></p>	
<p>Akreditasi Laboratorium</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan risiko, memungkinkan laboratorium untuk menentukan apakah personil melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan prosedur;</li> <li>• Perbaikan terus-menerus sistem manajemen laboratorium.</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Paket-paket Kritis di ruas penanganan Satker PJN Wil. V Prov. Papua (Puncak Jaya)</p>
<b>PAKET</b>	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
<b>MANFAAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penanganan Jalan dan Jembatan di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi :</b> Kegiatan K3 di salah satu Venue PON 2020, Stadion Papua Bangkit</p>
<b>PAKET/ KEGIATAN</b>	
Sistem Manajemen Mutu Jalan dan Jembatan	
<b>MANFAAT</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kualitas mutu dari pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar yang berlaku.</li> </ul>	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	<p><b>Deskripsi</b> : Kegiatan Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan di Laboratorium Pembangunan dan Pengujian BBPJK XVIII Jayapura</p>
<p><b>PAKET/KEGIATAN</b></p>	
<p>Uji Petik Mutu Konstruksi</p>	
<p><b>MANFAAT</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memeriksa kesesuaian bahan jalan dan jembatan sehingga layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis</li> </ul>	



**2019**

**SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**